

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki 16.000 pulau dan jumlah penduduk 268.074.600 jiwa pada tahun 2019 dan menempati peringkat keempat dunia sebagai negara terpadat (Badan Pusat Statistik Nasional, 2020, hal. 89). Karena begitu luas dan banyaknya penduduk di Indonesia, tidak dapat dipungkiri jika tidak seluruh masyarakat Indonesia dapat dijangkau oleh pemerintah secara sepenuhnya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kita masih mudah menemukan penduduk yang kondisi ekonominya rendah dikarenakan kurang adanya pemerataan.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang selalu menjadi perhatian utama pemerintah di dunia terutama untuk negara berkembang layaknya Indonesia, karena kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi. Permasalahan ini ditunjukkan dari data yang diterbitkan oleh BPS Nasional, yang mengatakan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 26.424.020 jiwa per-semester pertama tahun 2020. Jumlah kemiskinan di Indonesia meningkat jika dibandingkan dengan jumlah kemiskinan di tahun 2019 yang berjumlah 24.785.870 jiwa per-semester dua tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019). Hal ini terjadi karena meningkatnya angka pengangguran yang juga diakibatkan oleh terjadinya pandemi atau merebaknya virus korona di Indonesia bahkan dunia. Karena terjadinya pandemi korona ini tentu berdampak dalam penambahan jumlah pengangguran di Indonesia, pada bulan juli jumlah pengangguran di Indonesia bertambah 3.7 Juta Orang (CNBC Indonesia, 2020).

Berbanding lurus dengan masalah kemiskinan di Indonesia, masalah yang serupa juga terjadi di provinsi Kepulauan Riau, dalam Maret 2019 tercatat jika jumlah penduduk miskin di provinsi ini sebanyak 128.460 jiwa, dan Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau mencatat jika periode Maret 2014 hingga Maret 2020

tingkat kemiskinan Kepri mengalami naik-turun, baik dari sisi jumlah penduduknya ataupun persentasenya. Pada Maret 2020 tercatat 131.966 orang (5,92%) yang memiliki catatan pengeluaran rendah dalam jangka waktu per-bulan, angka ini meningkat sebesar 4.208 penduduk dibandingkan bulan September 2019 dengan jumlah 127.758 penduduk (Barakata, 2020).

Sejalan dengan keadaan Kepulauan Riau, Kota Batam merupakan kota yang cukup berkembang pesat di Kepulauan Riau hal ini dikarenakan Kota Batam memiliki letak geografis dan menjadikan Kota Batam sebagai kawasan khusus perdagangan bebas sehingga Batam di dominasi dengan perindustrian. Namun, di tengah-tengah kota yang berkembang seperti ini masih dapat ditemukan banyaknya masyarakat yang tidak merasakan perkembangan tersebut, sehingga memiliki perekonomian yang buruk ataupun rendah (Batamnews, 2020) masalah ini juga banyak ditemukan di Kota Batam mengingat Kota Batam merupakan penyumbang tertinggi untuk jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau yaitu dengan jumlah 67.06 ribu jiwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di Kota Batam dan salah satu faktor dari kemiskinan di Kota Batam tentunya karena banyaknya pengangguran, dimana tidak bekerjanya masyarakat yang berada diusia kerja dikarenakan ketersediaan lapangan pekerjaan yang belum memadai, maka dari itu perlu adanya pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) di setiap daerah karena memiliki peran yang sangat penting dimana puskesmas memberikan pelayanan kepada penduduk miskin berupa melayani keluhan dan memberikan penyelesaian terhadap keluhan-keluhan seperti yang dalam penelitian yang terdahulu dengan judul Peran Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Sosial Terintegratif (Habibullah, 2020).

Masalah kemiskinan seakan tidak pernah berhenti, maka dari itu pemerintah terus mengupayakan penurunan angka kemiskinan ini melalui program-program pengentasan kemiskinan, seperti yang disampaikan dalam penelitian terdahulu dengan judul Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Batam, banyak program pengentasan kemiskinan di Kota Batam namun program-program tersebut belum dapat mengurangi kemiskinan di Batam, faktor utamanya berada di tahap implementasinya, karena masih ditemukan banyak penerima bantuan

yang tidak memenuhi persyaratan sedangkan yang benar-benar dalam keadaan miskin tidak memperoleh bantuan tersebut (Putra & Abbas, 2019).

Masalah kemiskinan ini merupakan permasalahan yang sangat serius, kemiskinan menjadi bukti jika Indonesia belum dapat mencapai tujuan negara ini sesuai yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Sehingga pemerintah harus lebih serius lagi dalam upaya pengentasan kemiskinan, ada banyak cara untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, salah satunya seperti yang dinyatakan dalam penelitian terdahulu yang berjudul Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial yang mengatakan jika membentuk masyarakat menjadi seorang wirausaha sebagai upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, karena kewirausahaan sosial merupakan salah satu cara penunjang perekonomian masyarakat sehingga dapat membuat perekonomian dan penghasilan masyarakat menjadi lebih tinggi (Firdaus, 2014).

Karena begitu seriusnya permasalahan kemiskinan ini, pemerintah terus menerbitkan program-program baru guna memperbaiki program-program sebelumnya, sebagai upaya dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, maka pemerintah Indonesia menerbitkan program bantuan pangan non tunai. Program ini resmi berjalan pada tahun 2017 sebagai perubahan dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang berakhir di bulan Mei 2019. Pada tahun pertama berjalannya program ini sudah dapat menjangkau 1.286.194 penerima manfaat yang telah tersebar di 44 kota di Indonesia.

Adapun alur pendistribusian dari Bantuan Pangan Non Tunai yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan Bank yang telah ditunjuk dan distributor pangan seperti BULOG, BUM Des dan GAPOKTAN, di mana Bank yang akan mencatat seluruh transaksi yang akan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat dan distributor pangan yang akan menyalurkan bahan pokok kepada e-warong yang sudah terdaftar atau bekerjasama dengan Bank serta Distributor bahan Pangan. Semua yang menerima manfaat dapat memakai bantuan yang telah diberikan melalui e-warong ataupun agen yang telah ditetapkan.

Pada awal peresmian program ini bantuan yang diberikan berupa uang dalam bentuk e-wallet sebesar Rp 110.000/KPM dan hanya bisa dipakai untuk menebus beras dan telur yang sudah tersedia di E-Warong ataupun Agen yang telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Namun, di tahun 2020 ini, diakibatkan karena adanya pandemi virus corona. Kemensos RI mengubah nama Bantuan Pangan Non Tunai menjadi Program Pelaksanaan Sembako Kementerian Sosial dan masih berpacu pada kebijakan yang sama, namun bantuan ini dapat dipakai untuk menebus bahan pangan yang berupa beras, telur, kacang dan buah melalui e-warong ataupun agen, bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sebesar Rp 200.000/KPM dan tidak dapat dicairkan atau diuangkan, yang dapat menjadi bagian dari e-warong adalah agen bank, pedagang ataupun pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan bank penyalur dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah langsung yang dapat berupa koperasi, toko kelontong, pasar tradisional, dan lain sebagainya. Pencairan bantuan hanya dapat dilakukan di e-Warong juga hanya dapat dilakukan menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Untuk tata cara melakukan transaksi di e-Warong sendiri pemerintah sudah mencantumkan di setiap e-Warong yang terdaftar, sehingga masyarakat dapat melihat langsung bagaimana cara melakukan transaksi di e-Warong. Setiap e-warong yang telah terdaftar akan diberikan tanda yang berupa stiker yang bergambarkan bahan pangan di setiap e-warong nya.

Keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan merupakan masyarakat yang keadaan ekonomi keluarganya rendah sebesar 25% didaerahnya, dan sumber data penerima bantuan sosial pangan ini diperoleh dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang merupakan hasil dari pembaharuan basis data terpadu pada tahun 2015. Program BPNT ini dibentuk guna mengurangi beban masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang rendah untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam bidang pangan, memberikan gizi seimbang bagi masyarakat yang kurang mampu, meningkatkan ketepatan sasaran, memberikan pilihan dan kendali pada masyarakat kurang mampu (KPM) karena di program sebelumnya (Rastra) masyarakat tidak dapat memilih kualitas beras yang diinginkan karena sudah di beri subsidi oleh pemerintah sehingga banyak yang

mendapatkan beras dengan kualitas yang tidak diharapkan, serta untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai ini yaitu Permensos RI Nomor 20 tahun 2019 sebagai perubahan dari Permensos RI Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Pelaksanaan program BPNT di kota Batam sebenarnya sudah berjalan dengan baik, namun menurut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kota Batam, masih sering ditemukannya penyaluran yang tidak tepat sasaran (Tribun Batam 2020). Masyarakat yang menerima bantuan pangan non tunai di Kota Batam sendiri per Agustus 2020 tercatat sebanyak 23.086 KPM, jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan jumlah penerima di bulan Januari hingga Maret sebanyak 23.126 KPM hal ini dikarenakan banyak penerima bantuan (KPM) yang tidak memanfaatkan bantuan yang telah diberikan. Sebenarnya jumlah penerima bantuan di Kota Batam terdiri dari 30.000 KK namun yang menerima bantuan hanya 23.086 KK saja, hal ini dikarenakan Kementerian Sosial RI menggunakan data dari 10 Tahun yang lalu. Di Kota Batam sendiri memiliki 68 agen dan 33 e-warong yang menjadi media transaksi oleh penerima manfaat, jumlah ini tentunya belum merata di seluruh kecamatan ataupun kelurahan di Kota Batam seperti yang tertera dalam “Lampiran I” dalam skripsi ini.

Penyaluran bantuan pangan non tunai di Kota Batam berpedoman pada Permensos RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengerti sehingga banyak penerima bantuan tidak memanfaatkan bantuan tersebut. Tentunya banyak alasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak memanfaatkan bantuan tersebut, seperti terjadinya pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai ketentuan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai, kurangnya kerjasama antar pihak terkait, dan kualitas sarana dan prasarana yang diberikan. Dari masalah-masalah tersebutlah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait **“Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan pangan non tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam?
2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan pangan non tunai di Kota Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin disampaikan melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara

Penelitian ini memiliki manfaat menjadi sarana pembelajaran dan referensi jika ada pihak-pihak yang tertarik melakukan penelitian terkait Bantuan Pangan Non Tunai.

- 2) Untuk Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam dan

faktor-faktor yang menghambat Dinas Sosial dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai.

3) Untuk Peneliti Selanjutnya

Sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian terkait Bantuan Pangan Non Tunai.

2. Manfaat Praktis

1) Untuk Dinas Sosial Kota Batam

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai tinjauan literatur yang diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai.

2) Untuk E-Warong

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran untuk membangun e-warong kepada pelayanan yang lebih baik.

3) Secara Akademis, penelitian ini dapat memberikan pengertian yang dapat menjadi masukan bagi penelitian lain yang tertarik untuk mengkaji implementasi bantuan pangan non tunai di Kota Batam.

4) Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan saran atau kritik kepada pemerintah Kota Batam dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program bantuan pangan non tunai sehingga dapat terlaksana dengan baik serta mengatasi masalah kemiskinan di Kota Batam.



Universitas Putera Batam